

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)**
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp. (0254) 267142 Fax (0254) 267143



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025 mempunyai arti strategis dan hasil daripada musyawarah, koordinasi serta beberapa kali pengevaluasian demi pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif, terarah dan terkoordinasi.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 ini, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan selanjutnya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Serang, Maret 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten



H. Deden Apriandhi H, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya/IV,d
NIP. 19750428 199412 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4. Kinerja Pelayanan OPD	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran	36
3.3. Indikator Kinerja Utama	37
3.4. Target Indikator Kinerja Utama	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Ke empat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;

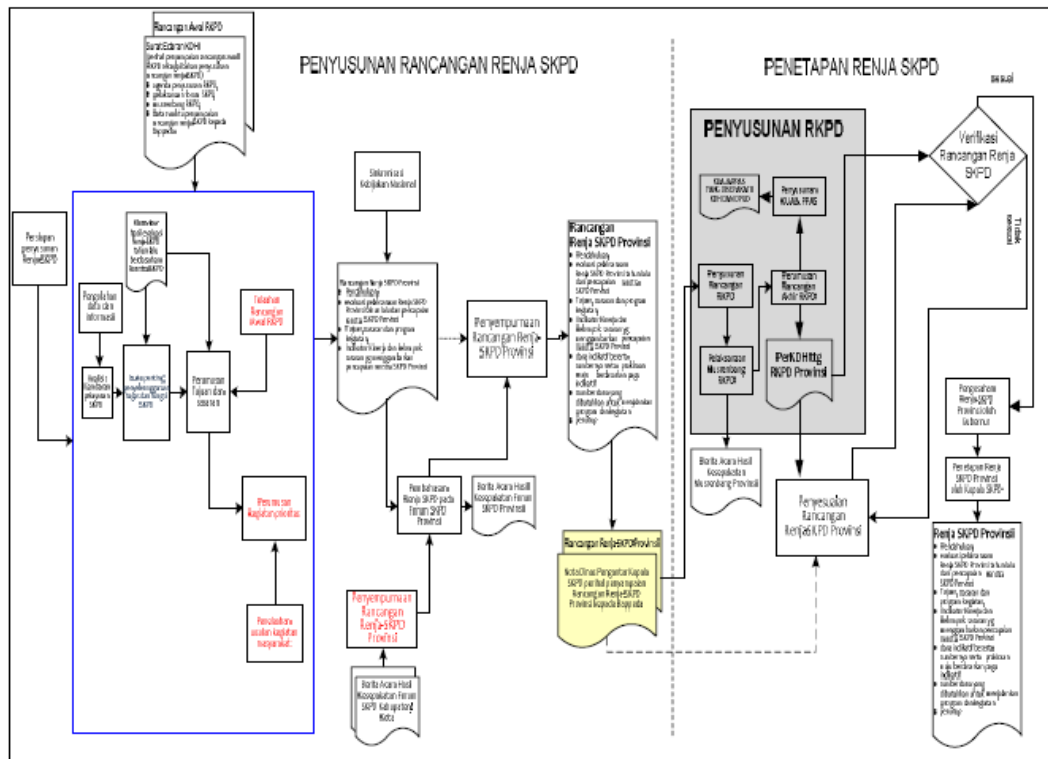
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Banten tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 yaitu “Pembangunan non Infrastruktur untuk membangun secara mental pola pikir manusia dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi menuju sejahtera” dan kebijakan strategis Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, meningkatkan peran serta masyarakat madani (*civil society*), meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan mengembangkan kelembagaan demokrasi lokal.

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 serta melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang



akan dicantumkan dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
17. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun yang lalu 2024 dan tahun berjalan 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Provinsi Banten tahun 2025.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Resntra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU,

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD,

Bab Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

Berisikan uraian mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN,

SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan (sebagaimana format terlampir)

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penaksiran atau penilaian, selanjutnya secara harfiah evaluasi berarti proses penentuan nilai suatu hal atau objek berdasarkan referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan evaluasi yaitu : (1) Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. (2) Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis/penelitian dan kemungkinan memberikan remedia teaching/perbaikan kegiatan.

Selanjutnya, Rencana Kinerja atau Renja rencana kerja tahunan, merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja secara jelas mendefinisikan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis yang konsisten dengan misi tersebut dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam kapasitas organisasi untuk implementasi.

Selanjutnya, Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Sehingga perlu adanya evaluasi penggunaan program kerja yang menggunakan anggaran baik APBD maupun APBN tentang keberhasilan dan kurang optimalnya dalam menyelenggarakan suatu program kegiatan yang telah di rencanakan pada awal usulan program dan kegiatan tahun sebelumnya, agar usulan tahun berikutnya lebih optimal dan efektif dalam melakukan suatu program melalui baik kegiatan fisik maupun non fisik demi tercapainya suatu pembangunan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan /kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Evaluasi Kinerja (performance appraisal) merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja. Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya

- Kinerja Keuangan

Anggaran Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebesar Rp. 472,432,707,399 (termasuk perubahan) dengan 6 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 30,284,730,453 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

- Kinerja Program dan Kegiatan

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2024 diperoleh hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebesar 100%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/Sangat memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Untuk mendukung pelaksanaan dari program tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat 12 Kegiatan dengan 64 Sub Kegiatan yang mana realisasi kinerja dari semua kegiatan tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:
 - a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
 - b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia; serta
 - c. Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Sumber Daya yang ada.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD:
Target capaian program Renstra tahun 2023 - 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
6. Kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil:

- a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
- b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. diperlukan penambahan pegawai agar pekerjaan dapat terbagi tidak tertumpuk terhadap satu pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Serta penugasan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai yang ada secara merata.
- c. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada. Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	OUTCOME
1.	2.	3.	4.



1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
		-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	Persentase Realisasi Capaian Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus DasarKebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	MENINGKATNYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah



pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik.

Kinerja satuan organisasi/kerja banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai perolehan kinerja atas pelayanan yang dilakukan. Nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan. Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari satuan organisasi/kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk mencapai kualitas efektifitas.

Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk, keterangan atau cirri-ciri. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator dapat digunakan untuk mengetahui faktor perubahan dalam mencapai mencapai tujuan tersebut. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut dibawah ini adalah Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 :

Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kriteria Kinerja	Faktor Pendukung/P enghambat/P ermasalahan
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)							
Badan Ksatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan stabilitas Daerah yang Kondusif untuk Mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	77,91	78,75	100%	Sangat Tinggi	Karena didukung secara optimal oleh Tim Pokja IDI Banten serta Sekretariat IDI Banten pada Badan Kesbangpol Provinsi Banten



		Penurunan Konflik Masyarakat	100	100	100%	Sangat Tinggi	Karena didukung secara optimal oleh Tim Terpadu Banten dan Forkopimda Provinsi Banten bersama unsur masyarakat Banten
--	--	------------------------------	-----	-----	------	---------------	---

c. Evaluasi Program Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Banten. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah, berikut di bawah ini :

1.	Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Kegiatan	:	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Anggaran	:	Rp 22,952,581,999
	Realisasi	:	Rp 13.762.036.428
	Prosentase realisasi	:	59,96%
2.	Program	:	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Anggaran	:	Rp 7,990,000,000
	Realisasi	:	Rp 4.326.318.023
	Prosentase realisasi	:	54,15%
3.	Program	:	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Anggaran	:	Rp 391,721,615,000
	Realisasi	:	Rp 366.479.684.766
	Prosentase realisasi	:	93,56%

4	Program	:	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Anggaran	:	Rp 1,327,127,400
	Realisasi	:	Rp 1.194.103.600
	Prosentase realisasi	:	89,98%
5.	Program	:	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Anggaran	:	Rp 4,757,873,000
	Realisasi	:	Rp 2.449.798.104
	Prosentase realisasi	:	51,49%
6.	Program	:	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Anggaran	:	Rp 43,683,510,000
	Realisasi	:	Rp 41.871.609.786
	Prosentase realisasi	:	95,85%

d. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan usulan sebesar **Rp. 472.432.707.399** (sebelum perubahan) terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan data dan informasi;
- 2) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- 3) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, maka

peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

f. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik/sumber daya, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*/dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*/Daftar anggaran belanja.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam membantu Gubernur Banten, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas pelayanan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perlu di tata dan dikelola secara terstruktur, rapi agar mendapatkan data yang akurat untuk pengelolaan kegiatan pembangunan selanjutnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- 1 Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- 2 Masih kurangnya keakuratan data dan ketepatan dalam menentukan kebijakan setelah data dianalisis.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya harmonisasi kebijakan (Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data (data sektoral pembangunan belum lengkap tersedia, koordinasi dengan SKPD lain perludi tingkatkan terkait data), Kurangnya Jumlah dan kemampuan SDM. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

a Isu Strategis

- 1) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
- 2) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- b Strategi Badan Kesbangpol Provinsi Banten
 - 1) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
 - 2) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.
- c Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten
 - 1) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM;
 - 2) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi.
- d Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten
 - 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
 - 2) Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani;
 - 3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten.
- e Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

 1. Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Kegiatan Pada Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
6. Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.



Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD.

Selanjutnya tabel dibawah ini merujuk pada tabel Renstra 2023-2026 dikarenakan menunjukan dalam tabel tersebut terdapat program dan kegiatan tahun 2024, Sebab pembangunan dirumuskan secara berkelanjutan dan progresif. Adapun jabatan Gubernur lama hasil Pemilukada 2017-2022 berakhir pada bulan Mei 2022, selanjutnya dalam Renstra 2023-2026 ada beberapa perubahan data-data penambahan nomenklatur kegiatan tahun 2024.

Secara umum dalam evaluasi ini bahwa pelaksanaan rencana kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun lalu melalui evaluasi secara diagnosa harus di padukan dengan Rencana Stratgis/Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibuat terlebih dahulu sebagai pedoman untuk membuat Renja/Rencana Kerja tahunan termasuk Renja tahun 2024 ini, secara evaluasi apakah sudah sesuai dengan Renstra atau masih harus ada perbaikan dalam melaksanakan kegiatan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Banten 2023 s/d Tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.



Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD 2023 s/d Tahun 2026
Provinsi Banten

Nama SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6=5/4
	Pemerintahan Umum				
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80	0	100%
		Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	78	0	100%
		Penanganan Konflik Masyarakat	100%	0	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	0	100%



						Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	0	100%
						Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	0	100%
						Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	0	100%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	0	100%
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0	100%
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	100%



						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	100%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0	100%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	100%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	0	100%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	100%



						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	100%
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0	100%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	0	100%
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	0	100%
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	0	100%
						Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	0	100%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	100%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	100%
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	100%
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	100%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0	100%



						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	0	100%
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	100%
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	0	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	0	100%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	0	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 unit	0	100%
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	105 Unit	0	100%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	0	100%



					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100%	0	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	0	100%
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	0	100%



						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dokumen	0	100%
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	500 Orang	0	100%
						Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan tugas Paskibraka	1 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0	100%
						Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0	100%
						Pembentukan Paskibraka	500 Dokumen	0	100%
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	78,75%	0	100%



					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Dokumen	0	100%
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Orang	0	100%



						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.500 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	0	100%
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	75%	0	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Dokumen	0	100%
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	0	100%



						Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	316 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	266 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan	0	100%
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	75%	0	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	100%
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	100%



						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Dokumen	0	100%
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100%	0	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Dokumen	0	100%



						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1355 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	0	100%
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 Dokumen	0	100%



2.4 Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Banten adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesbangpol Provinsi Banten

No	Indikator	SPM	IKK	Realisasi Capaian	Target Capaian	Catatan
				Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nilai IKM (Satuan : Skala)	-	Realisasi Belanja per Total APBD x 100%	98,68	-	
	Angka Partisipasi Pilpres	-		-	-	
	Angka Partisipasi Pileg	-		-	-	
	Angka Partisipasi Pilgub	-		-	-	
	Angka Partisipasi Pilkada	-		-	-	
	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan (Satuan : %)	-		75	75	
	Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Satuan : Kegiatan)	-		78	78	
	Persentase penurunan	-		100	100	



	jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan : %)					
--	---	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Banten

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	RENSTRA Kementerian Dalam Negeri 2023-2026	

Badan Kesbangpol Provinsi Banten akan melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

1. Mewujudkan Hubungan Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;
4. Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat;
5. Mewujudkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara;
6. Meminimalisir Potensi Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;
7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8. Memantapkan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.

3.2.2. Sasaran

1. Terlaksananya Hubungan Kerjasama Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

4. Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
5. Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
6. Tersedianya Sistem Informasi Potensi Konflik dan Isu-Isu Strategis.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
8. Optimalisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten yaitu:

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
2.	Meningkatnya Stabilitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Capaian Poin Demokrasi Kategori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi
		Angka Kriminalitas	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideologiradikal, isuseparatisme, sumberdaya ekonomi)

3.4 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Target indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Target Indikator Kinerja Utama 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai



	Akuntabel, Efektif, dan efisien		
2.	Meningkatnya Stabilitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	78,75 Nilai
		Jumlah konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM	100 Persen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya kebutuhan dana kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2025 ini, sebagaimana dapat di tuangkan dalam tabel berikut di bawah ini :



Tabel 2
Matrik Rancangan Rencana Kerja Akhir Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/B IDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN (N-1)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN (N+1)	
						TARGET TAHUN (N)		PAGU INDIKATIF (Rp.)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
						RANCANGAN RENJA	RENJA AKHIR	RANCANGAN RENJA	RENJA AKHIR			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8	UNSUR PEMERINTA HAN UMUM						67,849,803,400.00	64,284,587,600.00								70,995,183,00 0.00
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						67,849,803,400.00	64,284,587,600.00								70,995,183,00 0.00
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19,287,733,400.00	20,709,681,600.00								21,925,256,00 0.00



	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	470,069,000.00	457,233,000.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			100 Persen	378,000,000.00
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	210,525,000.00	156,588,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	72,308,000.00
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3,160,000.00	4,340,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	5,900,000.00
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3,160,000.00	4,340,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	5,900,000.00
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2,160,000.00	3,340,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	900,000.00



	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2,160,000.00	3,340,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	900,000.00
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16 Laporan	34,400,000.00	25,600,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	127,800,000.00
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	13 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	70,640,000.00	62,820,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		4 Laporan	64,292,000.00
	8.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Laporan)			1 Data	1 Data	56,936,000.00	22,380,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Data	10,000,000.00



	8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	1 Berita Acara	86,928,000.00	87,488,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Berita Acara	90,000,000.00
	8.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 DOKumen		86,997,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	86,997,000.00
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13,671,000,000.00	15,105,810,000.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			100 Persen	14,871,256,000.00
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	39 Orang / 14 Bulan	39 Orang / 14 Bulan	39 Orang / 14 Bulan	39 Orang / 14 Bulan	13,181,683,000.00	14,482,940,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD/DAU		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		39 Orang / 14 Bulan	14,392,066,000.00
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	48 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	329,317,000.00	462,870,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Dokumen	419,190,000.00



	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	48 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	16,000,000.00	16,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Dokumen	9,500,000.00
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	48 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	41,000,000.00	41,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Dokumen	14,925,000.00
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Laporan	5,575,000.00
	8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16,400,000.00	16,400,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	10,000,000.00
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Laporan)	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	30,900,000.00	30,900,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		18 Laporan	10,000,000.00



	8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,700,000.00	15,700,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	10,000,000.00
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	190,019,600.00	190,019,600.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa				1,385,769,000.00
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	184,019,600.00	184,019,600.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	976,214,000.00
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Laporan	379,555,000.00
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Laporan	30,000,000.00



8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300,319,000.00	300,319,000.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa				368,669,050.00
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Paket	98,350,000.00
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	20,000,000.00
8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55,104,000.00	55,104,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	85,104,050.00
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Dokumen	50,000,000.00
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		25 Orang	10,000,000.00



	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100 Orang	25 Orang	25 Orang	50 Orang	23,340,000.00	23,340,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		25 Orang	28,340,000.00
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPer undang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)	100 Orang	25 Orang	25 Orang	50 Orang	71,875,000.00	71,875,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		25 Orang	76,875,000.00
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	513,867,500.00	513,841,700.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa				888,486,000.00
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		2 Paket	224,000,000.00
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Paket	111,800,000.00



	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18,000,000.00	18,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	25,000,000.00
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145,867,500.00	145,841,700.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	475,686,000.00
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	30,000,000.00
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	22,000,000.00
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2,683,066,900.00	2,683,066,900.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa				2,573,684,550.00
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	27,000,000.00	27,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	27,000,000.00



	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	445,000,000.00	445,000,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	335,617,650.00
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	304,490,900.00	304,490,900.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	304,490,900.00
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,906,576,000.00	1,906,576,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		12 Laporan	1,906,576,000.00
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,459,391,400.00	1,459,391,400.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa				1,459,391,400.00
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	156 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	834,514,400.00	834,514,400.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		39 Unit	834,514,400.00



	8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	405 Unit	105 Unit	105 Unit	105 Unit	432,981,000.00	432,981,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		105 Unit	432,981,000.00
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	191,896,000.00	191,896,000.00	Kota Serang, Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Apatarur Pemerintah		1 Unit	191,896,000.00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00							100 Persen	3,822,650,063.00
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			100 Persen	3,822,650,063.00



	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Dokumen	300,000,000.00
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	36 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		9 Dokumen	1,522,650,063.00
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Orang)	4 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang/Lembaga	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Orang	350,000,000.00



	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	600 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		150 Orang	250,000,000.00
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		3 Laporan	350,000,000.00



	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		2 Dokumen	250,000,000.00
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibra ka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibra ka Duta Pancasila (Orang)	1500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	400,000,000.00	400,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		500 Orang	200,000,000.00
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaa n dan Purnapaskibra ka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibra ka (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Dokumen	100,000,000.00
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Dokumen	100,000,000.00



	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibra ka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibra ka Duta Pancasila (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Dokumen	100,000,000.00
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibra ka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibra ka Duta Pancasila (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Dokumen	100,000,000.00
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibra	Jumlah Paskibra(Orang)	1500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	400,000,000.00	400,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		500 Orang	200,000,000.00
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Nilai IDI pada poin hak-hak politik	69.38 Nilai	67.78 Nilai	68.58 Nilai	68.58 Nilai	30,850,640,000.00	30,850,640,000.00							69.38 Nilai	19,304,252,937.00



	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Capaian Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30,850,640,000.00	30,850,640,000.00							Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa		100 Persen	19,304,252,937.00
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD					Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah	2 Dokumen	350,000,000.00



	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	65,000,000.00	65,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		2 Dokumen	350,000,000.00
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 Orang/Lembaga	12 Orang/Lembaga	12 Orang/Lembaga	10 Orang/Lembaga	30,500,640,000.00	30,500,640,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		12 Orang	17,394,252,937.00



	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	600 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	110,000,000.00	110,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		150 Orang	860000000
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	75,000,000.00	75,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		4 Laporan	350,000,000.00



	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	500,000,000.00	500,000,000.00							100 Persen	845,000,000.00
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	500,000,000.00	500,000,000.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			100 Persen	845,000,000.00
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun(Dokumen)	8 Dokumen			2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		2 Dokumen	150,000,000.00



	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		2 Dokumen	100,000,000.00
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	400 Orang	100 Orang	100 Orang	210Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		100 Orang	110,000,000.00
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	400 Orang	100 Orang	100 Orang	125 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		100 Orang	110,000,000.00



	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		6 Laporan	375,000,000.00
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)	89.82 Nilai	88.62 Nilai	89.22 Nilai	89.22 Nilai	2,400,000,000.00	1,900,000,000.00							89.82 Nilai	1,133,000,000.00
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2,400,000,000.00	1,900,000,000.00				Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			100 Persen	1,133,000,000.00



	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	125,000,000.00
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		1 Dokumen	108,000,000.00



	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	4 Orang	1 Orang/Lembaga	1 Orang/Lembaga	9 Orang/Lembaga	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		1 Orang	250,000,000.00
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah(Orang)	600 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Apatarur Pemerintah		150 Orang	400,000,000.00



	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		4 Laporan	250,000,000.00
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10,711,430,000.00	6,224,266,000.00							100 Persen	23,965,024,000.00
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10,711,430,000.00	6,224,266,000.00				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			100 Persen	23,965,024,000.00



	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		3 Dokumen	145,000,000.00
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		3 Dokumen	130,000,000.00



	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	32 Orang	8 Orang	8 Orang	11 Orang/Lembaga	9,811,430,000.00	5,311,430,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		8 Orang	20,450,000,000.00
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	600 Orang	150 Orang	150 Orang	320 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		150 Orang	615,326,000.00



	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Laporan)	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		3 Laporan	250,000,000.00
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00	512,836,000.00	Provinsi Banten	PAD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Masyarakat, Aparatur Pemerintah		1 Dokumen	2,374,698,000.00



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Banten 2023-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Banten serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun OPD yang membidangi fungsi lain.

Serang, Maret 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten



H. DEDED APRIANDHI H, S.STP, M.Si
NIP. 19750428 199412 1 001